

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

A.A. Ngurah Agung Kresnandra¹
Ni Made Adi Erawati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: agungkresnandra@gmail.com / telp: +62 87 860 41 50 51

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal, seperti ditekankan teori *fiscal federalism*, akan memicu peningkatan PAD (pajak dan retribusi daerah) dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah hingga akhirnya berpotensi mereduksi tingkat pengangguran. Namun, ada dugaan kuat bahwa pengaruh PAD tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran melainkan bersifat kontingen yaitu, salah satunya, tergantung pada belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak moderasi belanja modal terhadap pengaruh PAD (retribusi dan pajak daerah) pada tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Data telah diuji dan telah memenuhi asumsi klasik dan model fit serta dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Untuk pengujian secara parsial, hanya pajak daerah yang berpengaruh negatif dan signifikan sementara retribusi daerah dan belanja modal tidak berpengaruh. Pengaruh moderasi belanja modal tidak mampu memoderasi pajak dan retribusi daerah terhadap tingkat pengangguran.

Kata Kunci: PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran

ABSTRACT

Fiscal decentralization in Indonesia requires local governments to seek funding sources to finance local spending in the hopes of an improvement in regional economic growth, which in turn will spur the growth of the national economy. This is consistent with the theory of fiscal federalism. One form of funding is owned local revenue (PAD). However, the increase does not necessarily PAD may spur regional economic growth. PAD greater allocation for capital expenditure compared to expenditure, will lead to economic growth and development can be carried out effectively through the creation of capital projects that provide new jobs in order to reduce the level of unemployment and poverty in the area. Throughout the observation period of 5 years to 9 districts / municipalities in the province of Bali. Hypothesis testing using multiple regression. Simultaneous hypothesis testing results, local taxes, levies and capital expenditures affect the unemployment rate. For partial testing, only the negative effect of local taxes and levies and significant while capital expenditure has no effect. Moderating influence capital expenditure is not able to moderate taxes and levies on the unemployment rate.

Keywords: Local Government Income, Tax and Retribution Income, Capital Expenditure, Unemployment Rate

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang telah berlangsung di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh berkembangnya teori *Fiscal Federalism* yang dikembangkan oleh Hayek (1945) dan Musgrave (1959) yang intinya menyatakan bahwa pertumbuhan nasional dapat diakselerasi dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendanaan daerah adalah PAD yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2006). Novita (2012) menyatakan bahwa peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Namun hal tersebut tidaklah selalu bersifat linear. Belanja daerah yang di dalamnya terdapat proyek modal yang dapat menciptakan *outcome* akan sangat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun sebaliknya, bila proyek modal tersebut merupakan proyek mubazir atau hanya memberikan *income* marjinal hasilnya tidak akan cukup untuk mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang ada di daerah.

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya dugaan bahwa meningkatnya pajak dan retribusi daerah tidak serta merta mengurangi pengangguran, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat pengaruh PAD (pajak dan retribusi daerah) dan belanja modal terhadap beberapa variabel terikat antara lain tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan memfokuskan pada pengaruh pajak dan retribusi daerah pada tingkat pengangguran serta melihat dampak variabel moderasi belanja modal pada pajak dan retribusi daerah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Solow dan Swan mengembangkan teori pertumbuhan neo klasik sejak tahun 1950 (Arsyad dalam Suaryana,2010). Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal serta tingkat kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal yaitu: hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah, hubungan keagenan antara

eksekutif dan legislatif kemudian antara legislatif dengan publik dan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat penyusunan APBD. Dalam sudut pandang teori keagenan, hal ini merupakan sebuah bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Moe dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal*. Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal. Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik yang merupakan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.

Teori *Fiscal Federalism*

Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972). Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan

daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda). Teori *fiscal federalism* terbagi atas dua perspektif teori yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

Penekanan terhadap keuntungan alokatif dari desentralisasi untuk mendapatkan kemudahan informasi dari masyarakat merupakan pandangan teori tradisional tentang *fiscal federalism* sementara menurut Maggi dan Ladurner (2009) *new perspective theories* lebih menekankan untuk melihat ke dalam setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, bagaimana pemerintah (eksekutif dan legislatif) berperilaku, berperan dan berpikir beserta lembaga-lembaga mereka.

Pajak Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Belanja Modal

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dilihat dari jenisnya, belanja modal terdiri atas belanja publik yaitu belanja yang membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dan manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum serta belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut.

Pengaruh Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran

Setiyawati (2007) menyatakan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyusun PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak dan retribusi daerah secara optimal, maka daerah akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu daerah akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerahnya. Setiyawati (2007) menyatakan bahwa pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan erat dengan belanja modal atau yang sering disebut belanja pembangunan. Dengan demikian strategi pengalokasian anggaran yang tepat adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor pembangunan melalui pengalokasian hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan dapat menurunkan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ha. 1 : pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal secara bersama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Parsial Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur dari tiga komponen penyusun PAD. Kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut pajak dan retribusi ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Novita, 2012). Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari pajak dan retribusi daerah dapat juga digunakan

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan menarik minat masyarakat untuk turut serta, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ditambah lagi dengan tersedianya fasilitas publik baru, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan tercipta yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten/kota tersebut.

Ha.2 : pajak daerah berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Ha.3 : retribusi daerah berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Parsial Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran

Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin atau keserasian belanjanya rendah (Abimanyu, 2005). Halim (2002:73) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Apabila proporsi belanja modal lebih besar dari belanja rutin, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sehingga fasilitas pelayanan publik kepada masyarakatpun meningkat dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Ha. 4 : belanja modal berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Moderasi Belanja Modal terhadap Pajak dan Retribusi Daerah pada Tingkat Pengangguran

Ismerdekaningsih dan Rahayu (2002) menyatakan bahwa pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan adanya perbaikan dan penambahan infrastruktur sektor publik oleh pemerintah daerah, diharapkan akan menjadi stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan perekonomian daerah nantinya akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Saragih (2003) menyatakan bahwa jika pemerintah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan pernyataan Saragih, Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

- Ha. 5 : tingginya belanja modal meningkatkan pengaruh negatif pajak daerah pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- Ha. 6 : tingginya belanja modal meningkatkan pengaruh negatif retribusi daerah pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Obyek dari penelitian ini adalah pajak dan retribusi daerah, anggaran belanja modal serta tingkat pengangguran di Provinsi Bali tahun 2007-2011. Data diperoleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan

Pusat Statistik Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Ditinjau dari rumusan masalah dan hipotesis yang telah diuraikan, maka variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran (Y), pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) serta moderasi belanja modal (X3). Pajak Daerah (X1) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah (X2) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Belanja Modal (X3) adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (asset tetap). Pengangguran (Y1) Definisi pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bali satu kota madya dan delapan kabupaten dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:122).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Penelitian ini mencakup 9 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Penelitian ini menggunakan data *time series*, yang digunakan selama periode 2007 hingga 2011. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 45 amatan. Besarnya amatan tersebut diperoleh dari data keuangan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum data di analisis menggunakan regresi berganda, data telah lulus uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Kelayakan model regresi berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil nilai *P-value* = 0,001 signifikan pada $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berganda penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model.

Hasil uji koefisien determinasi dengan parameter Adj. $R^2 = 33,33\%$. Ini berarti variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal mampu menjelaskan perubahan variabel dependen tingkat pengangguran sebesar 33,33%, sedangkan sisanya sebesar 66,67% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Hasil Uji Regresi Berganda

Pengujian regresi berganda dilakukan dalam rangka menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasil uji F menegaskan bahwa pajak daerah/pd (X_1), retribusi daerah/rd (X_2), dan belanja modal/bm (X_3) secara simultan berpengaruh negatif dan

Selanjutnya, pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji Regresi dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Uji pengaruh pajak daerah/pd (X_1) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,05$ pada $\alpha = 5\%$ dengan koefisien beta $-0,0000000091$, yang berarti bahwa pajak daerah/pd (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran/tp (Y). Hasil uji ini berarti gagal menolak hipotesis alternatif 2 yang menyatakan bahwa pajak daerah/pd (X_1) berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran/tp (Y).
- 2) Uji pengaruh retribusi daerah/rd (X_2) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,000$ pada $\alpha = 5\%$ dan koefisien beta $0,000000176$, yang berarti bahwa retribusi daerah/rd (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran (tp). Hasil uji ini berarti menolak hipotesis alternatif 3 yang menyatakan bahwa retribusi daerah/rd (X_2) berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran/tp (Y). Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan

oleh beberapa hal, antara lain: a) pengelolaan sumber-sumber pendapatan atas retribusi daerah masih belum dikelola secara maksimal sehingga hasil retribusi yang didapat oleh pemerintah daerah masih kecil proporsinya dalam PAD, b) peningkatan retribusi yang dibarengi dengan peningkatan tingkat pengangguran di Provinsi Bali disebabkan proporsi retribusi daerah di Provinsi Bali masih sangat kecil jika dibandingkan dengan proporsi pajak daerahnya, hal ini menyebabkan hasil retribusi daerah tidak mampu digunakan pemerintah daerah untuk menciptakan proyek modal yang dapat menyerap tenaga kerja, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang terus tumbuh tiap tahunnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja untuk datang ke Bali menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Bali.

- 3) Uji pengaruh belanja modal/bm (X_3) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y) diperoleh $P\text{-Value} = 0,399$ pada $\alpha = 5\%$ dan koefisien beta $-0,0000000197$, yang berarti bahwa belanja modal/bm (X_3) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran/tp (Y). Hasil uji ini menolak hipotesis alternatif 4 yang menyatakan bahwa belanja modal/bm (X_3) berpengaruh negatif pada pengangguran/tp (Y). Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal antara lain : a) proporsi belanja modal pada keserasian belanja daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja rutin yaitu rata-rata paling rendah 11,32% hingga paling tinggi sebesar 22,51%, b) walaupun alokasi pada belanja modal meningkat namun komponen belanja modal termasuk belanja modal

aparatur, seperti kendaraan dinas, rumah dan gedung pemerintahan, yang kurang menyokong produktivitas perekonomian daerah, c) komponen belanja modal yang berupa proyek-proyek modal fisik bisnis seperti terminal, tempat pelelangan ikan, dan bentuk proyek modal bisnis lainnya, tidak sedikit yang hanya mampu menciptakan *income* (PAD) yang kecil/*marginal* dan bahkan proyek modal bisnis yang mubazir.

Pengujian hipotesis penelitian berikutnya dilakukan untuk melihat dampak moderasi belanja modal/bm dan pajak daerah/pd (LnX_1X_3) dan moderasi belanja modal/bm dan pajak daerah/pd (LnX_2X_3) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y):

- 1) Hasil uji regresi pengaruh interaksi belanja modal/bm dan pajak daerah/pd (LnX_1X_3) diperoleh $P\text{-Value} = 0,00$ pada $\alpha = 5\%$ dan koefisien beta 2734,685, yang berarti tingginya belanja modal/bm (X_3) meningkatkan pengaruh positif pajak daerah/pd (X_1) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y). Hasil uji ini berarti menolak hipotesis alternatif 5 yang menyatakan bahwa tingginya belanja modal/bm (X_3) akan meningkatkan pengaruh negatif pajak daerah/pd (X_1) pada tingkat pengangguran/tp (Y). Kondisi ini membuktikan bahwa a) meningkatnya alokasi belanja modal, sebagai akibat meningkatnya PAD, bukan pada komponen belanja modal untuk proyek modal fisik (bisnis) yang dapat menyediakan lapangan kerja b) meningkatnya alokasi belanja modal, sebagai akibat meningkatnya PAD, memang dialokasikan pada komponen belanja modal namun pada proyek modal fisik (bisnis) mubazir dan atau tidak berkelanjutan.

Sudah tentu dengan kondisi kedua hal di atas menjadikan peningkatan belanja modal justru tidak cukup menyediakan lapangan kerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

- 2) Hasil uji regresi pengaruh interaksi belanja modal/bm dan retribusi daerah/rd ($\ln X_2 X_3$) diperoleh $P\text{-Value} = 0,408$ pada $\alpha = 5\%$ dan koefisien beta $-2389,161$, yang berarti tingginya belanja modal/bm (X_3) meningkatkan pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan, retribusi daerah/rd (X_2) terhadap tingkat pengangguran/tp (Y). Hasil uji ini berarti menolak hipotesis alternatif 6 yang menyatakan bahwa tingginya belanja modal/bm (X_3) akan meningkatkan pengaruh negatif retribusi daerah/rd (X_2) pada tingkat pengangguran/tp (Y). Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh: a) kecilnya proporsi pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh PAD terhadap penurunan tingkat pengangguran b) karakteristik proyek model yang dibiayai dari belanja modal tidak sedikit yang mubazir dan tidak berkelanjutan sehingga sedikit dapat menyediakan atau menyerap tenaga kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal secara bersama berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran. Secara parsial hanya pajak daerah saja yang berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran sementara retribusi dan belanja modal tidak berpengaruh. Untuk pengaruh variabel moderasi menunjukkan tidak ada

pengaruh yang signifikan moderasi belanja modal terhadap pajak dan retribusi daerah pada tingkat pengangguran.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu , pertama, pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah termasuk didalamnya mengoptimalkan pengelolaan hasil pajak dan retribusi daerah dan melakukan perencanaan yang lebih matang saat merealisasikan proyek-proyek modal agar tidak ada proyek modal yang mubazir yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi. Kedua, peneliti selanjutnya dapat variabel lain seperti misalnya tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi atau bahkan menggunakan variabel bebas yang lain seperti PAD dan DAU dalam kaitanya terhadap tingkat pengangguran untuk menguji sejauh mana desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

REFERENSI

- Musgrave, Richard.1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*, New York: McGraw.
- Hayek, Friedrich. 1945. *The Use of Knowledge in Society.*” *American Economic Review*, 35: 519-530.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

- Darwanto dan Yustikasari. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Kasus Kabupaten /Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Novita. 2012. Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Keserasian Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar.
- Suaryana. 2010. Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Keserasian Belanja Daerah, dan Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Riset, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Von Hagen, Jurgen. 2003. *Budgeting Institutions and Public Spending, in Shah, Anwar (ed.). 2003. Handbook on Public Sektor Performance Reviews. Volume 1: Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line. Washington, D.C.: The World Bank.*
- Oates, W.E. 1972. "Fiscal Decentralization and Economic Development." *National Tax Journal* 46.
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. *Federal Features and Financial Decentralization.Inhouse Seminar. Eurac Research.*
- Republik Indonesia. 2009. UU Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Setiyawati, Anis. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 4. Surabaya.
- Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu.

Ismerdekaningsih, Herlina dan Endah Sri Rahayu. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). ITB Central Library.

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago.* Vol 49. Hal : 1 – 21.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia.

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Bisnis.*Bandung: Alfabeta.